

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

DAFTAR ISI

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP).....	1
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.....	1
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	1
D. Ruang Lingkup.....	2
II. SEKILAS TENTANG SPIP.....	3
A. Pengertian.....	3
B. Tujuan SPIP.....	3
C. Unsur-unsur SPIP.....	3
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>).....	6
III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN.....	7
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik.....	7
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	7
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	8
IV. RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN.....	10
A. Pernyataan Tujuan.....	10
B. Resiko-resiko.....	11
C. Kegiatan Pengendalian Terpasang.....	14
D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan.....	14
V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	21
VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	22
A. Pemantauan Berkelanjutan.....	22
B. Evaluasi Terpisah.....	22
C. Pelaksanaan Tindak lanjut.....	23
D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP.....	23
VII. PENUTUP.....	24

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumassedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan Resiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta

pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Commented [a1]: PP 60 Tahun 2008 ttg SPIP

Commented [a2]: PP 60 Tahun 2008 ttg SPIP

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Membangun lingkungan

pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terciptanya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan resiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko.

Tahapan penilaian sbb :

1. Identifikasi resiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi resiko perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa resiko.
2. Analisis resiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa resiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa resiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status resiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak resiko.
3. Evaluasi resiko.

Tujuan Penilaian resiko untuk :

1. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh resiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal.
2. Menyusun peringkat resiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganan agar dapat dikelola secara efektif.

Penilaian resiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Kegiatan untuk mengendalikan resiko dikelompokkan dalam dua kategori yaitu : *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa resiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa resiko. Kegiatan pengendalian juga dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Kegiatan monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan berkelanjutan dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan menggunakan kriteria pemantauan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, *Standard Operating Procedures* (SOP), dan lain-lain.

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan landasan dasar dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk :

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai

No	Sub Unsur	Kondisi
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Perbub tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. - Menyusun kode etik tingkat Dinas yang merupakan turunan Perbub dalam bentuk Peraturan Kepala Dinas - Sosialisasi kode etik tingkat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kaderisasi staf dan mengembangkan kompetensi SDM. - Pelatihan yang memadai dilakukan kepada pegawai sebelum menduduki jabatan penting. - Mengikutsertakan diklat dan sertifikasi pegawai yang menjalankan tugas khusus
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Menenempatkan pegawai sesuai kualifikasi yang dimiliki; - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan dan ketersediaan SDM.

RTP SPIP Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan revidu dan evaluasi secara berjenjang terhadap kinerja aparatur di lingkungan DPU. - Melakukan komunikasi tentang wewenang dan tanggung jawab secara jelas. - Melaksanakan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan.
V	Perwujudan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Efektif.	<ul style="list-style-type: none"> - APIP memberikan materi/ pembekalan SPIP - APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian Intern secara periodik - APIP melakukan review atas kepatuhan hukum dan peraturan lainnya. - Menindaklanjuti saran/ rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP.

IV. RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum yang andal. Dalam tahun 2018, Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan SDA melalui konservasi SDA, penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan terpadu;
2. Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi untuk memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien;
3. Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman menjangkau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pelosok perdesaan;
4. Mempertahankan kondisi jalan yang mantap agar bisa berfungsi secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna;
5. Meningkatkan pengelolaan bangunan milik pemerintah dan layanan informasi penataan ruang;
6. Mewujudkan Keterpaduan penanganan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah
7. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang andal, efektif dan efisien;
8. Optimalisasi peran kelembagaan dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

C. Resiko-resiko

Berdasarkan hasil penilaian atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Resiko-resiko dimaksud meliputi resiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan resiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu:

1. Resiko atas pencapaian Tujuan 1

“Meningkatkan pengelolaan SDA melalui konservasi SDA, penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan terpadu” :

1. Embung-embung tidak dimanfaatkan sebagai sumber air baku;
2. Sebagian besar mata air dalam kondisi rusak;
3. KMPS tidak dapat aktif dalam membantu kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai;
4. Panjang sungai yang mengalami pengurangan kapasitas (pendangkalan) semakin bertambah;
5. Banyak bangunan liar dan penggunaan lain di Sempadan sungai;
6. Banyak Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai yang rawan longsor;
7. Panjang talud/bronjong dalam kondisi rusak semakin meningkat;
8. Banyak Daerah kritis di bantaran sungai dan badan jalan;
9. Sistem Informasi/Data base SDA kurang berkualitas;
10. Data Sumber Daya Air kurang berkualitas.

2. Resiko atas pencapaian Tujuan 2 :

“Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi untuk memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien”:

1. Kondisi Irigasi kabupaten dalam kondisi rusak jumlahnya semakin besar;
2. Pelayanan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada tidak optimal;
3. GP3A/IP3A tidak aktif;
4. Kegagalan Konstruksi.

3. Resiko atas pencapaian Tujuan 3 :

“Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman menjangkau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pelosok perdesaan” :

1. Banyak Jalan Kabupaten Banyumas dalam kondisi rusak;
2. Banyak Jembatan Kabupaten dalam kondisi Rusak;

3. Rendahnya angka pertambahan jumlah jembatan di Kabupaten Banyumas;
4. Kegagalan Konstruksi;
5. Rasio panjang jalan di Kabupaten Banyumas masih rendah;
6. Tidak tersedia Lahan / tanah untuk pembangunan infrastruktur;
7. Akses infrastruktur jalan perdesaan kurang memadai;
8. Akses Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk kurang memadai;
9. Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan.

4. Resiko atas pencapaian Tujuan 4 :

“Mempertahankan kondisi jalan yang mantap agar bisa berfungsi secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna” :

1. Menurunnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik;
2. Menurunnya Jumlah Jembatan dalam kondisi baik;
3. Kelompok Masyarakat Peduli Jalan (KMPJ) kurang aktif;
4. Panjang jalan yang ada belum dapat menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman;
5. Banyak Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar;
6. Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan;
7. Infrastruktur Talud / bronjong pengaman jalan dalam kondisi rusak;
8. Kegagalan Konstruksi;
9. Sistem Informasi / Data base jalan dan jembatan kurang berkualitas;
10. Data Jalan dan jembatan kurang berkualitas.

5. Resiko atas pencapaian Tujuan 5 :

“Meningkatkan pengelolaan bangunan milik pemerintah dan layanan informasi penataan ruang” :

1. Kegagalan Konstruksi;
2. Banyak Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Rusak;
3. Pengelolaan bangunan milik pemerintah tidak optimal.

6. Resiko atas pencapaian Tujuan 6 :

“Mewujudkan Keterpaduan penanganan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah” :

1. Perencanaan Teknis Dinas PU tidak berkualitas;
2. Rekomendasi Pelayanan Masyarakat kurang memuaskan;

3. Penyedia Jasa Konstruksi di kabupaten Banyumas kurang berkembang;
4. Jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik tertunda;
5. Gagal Lelang;
6. Pelaksanaan Pekerjaan Lambat / Terjadi Putus Kontrak.

7. Resiko atas pencapaian Tujuan 7 :

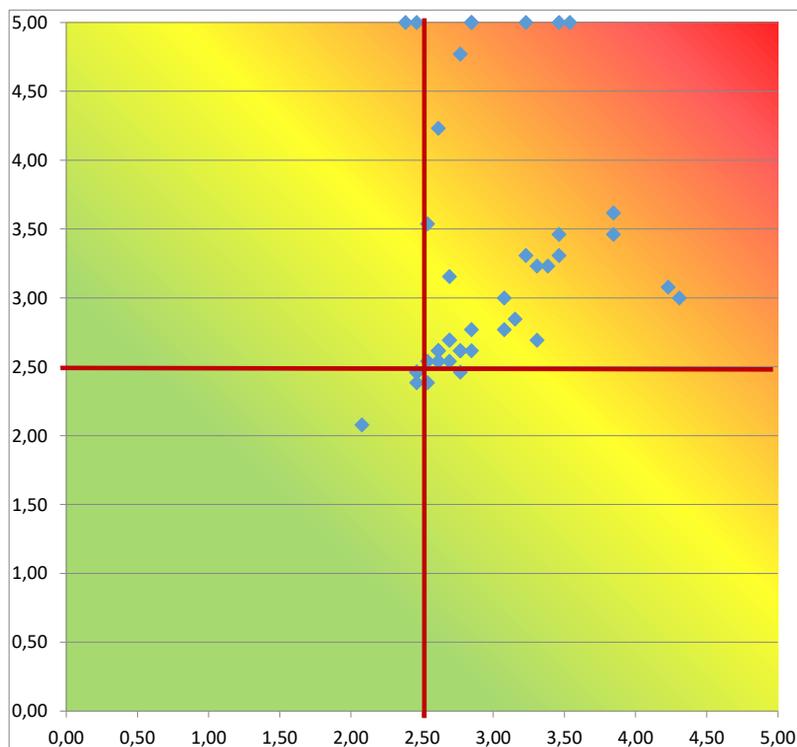
“Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang andal, efektif dan efisien” :

1. Kualitas sarana prasarana aparatur rendah;
2. Pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai prosedur.

8. Resiko atas pencapaian Tujuan 8 :

“Optimalisasi peran kelembagaan dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik” :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran kurang berkualitas;
2. Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai;
3. Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan buruk.



D. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi resiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Membuat Peraturan Kepala Dinas tentang Kode Etik ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas;
2. Mengirimkan peserta diklat sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
3. Menempatkan pegawai sesuai kualifikasinya;
4. Membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP) untuk semua jenis pelayanan;
5. Menyusun Tim untuk kegiatan / pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Misal : PA, KPA, PPTK, Sekgit, Koordinator Pengawas, Pengawas, Pejabat Pengadaan, PPHP dll.;
6. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
7. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas (Data Kondisi Infrastruktur sebagai salah satu acuan prioritas);
8. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan (SimWasPU, RKO-RFK);
9. Memasang *standing banner* terutama berdasarkan kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

E. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan Resiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab resiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila resiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan 1** : Meningkatkan pengelolaan SDA melalui konservasi SDA, penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan terpadu.

Resiko 1 : Embung tidak dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

- Menyusun database embung;

- Melakukan analisis terkait kebutuhan air baku;
 - Melaksanakan pembangunan / rehabilitasi embung;
- Resiko 2 : Sebagian besar mata air kondisi dalam kondisi rusak.
- Menyusun database mata air;
 - Melakukan analisis terkait dampak kerusakan mata air;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait mata air dan dampak kerusakannya;
- Resiko 3 : KMPS tidak dapat aktif dalam membantu kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai.
- Melaksanakan pendataan KMPS;
 - Melaksanakan Pembinaan terhadap KMPS;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan KMPS;
- Resiko 4 : Panjang sungai yang mengalami pengurangan kapasitas (pendangkalan) semakin bertambah.
- Melaksanakan pendataan kerusakan sungai terutama yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat / provinsi terkait upaya Pemeliharaan Sungai;
- Resiko 5 : Banyak bangunan liar dan penggunaan lain di Sempadan sungai.
- Melaksanakan pendataan sempadan sungai;
 - Melaksanakan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait fungsi sungai;
- Resiko 6 : Banyak Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai yang rawan longsor.
- Melaksanakan kegiatan pembangunan Turap / Talud / Bonjong di Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai
- Resiko 7 : Panjang talud/bronjong dalam kondisi rusak semakin meningkat.
- Melaksanakan kegiatan pembangunan talud/bronjong
- Resiko 8 : Banyak Daerah kritis di bantaran sungai dan badan jalan.
- Melaksanakan kegiatan perkuatan tebing;
- Resiko 9 : Sistem Informasi/Data base SDA kurang berkualitas.
- Pemanfaatan dan *updating* aplikasi Sistem Informasi/Data base SDA.

- Melaksanakan kegiatan pendataan/survey kerusakan jaringan irigasi/SDA dengan melibatkan tenaga UPTD yang rutin dan melekat menjadi tupoksinya.

Resiko 10 : Data Sumber Daya Air kurang berkualitas.

- Ada personil khusus yang merekap data yang terkumpul dan mengolahnya menjadi data matang;

2. Tujuan 2 : Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi untuk memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien;

Resiko 1 : Kondisi Irigasi kabupaten dalam kondisi rusak jumlahnya semakin besar;

- Melaksanakan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
- Memaksimalkan tugas Mantri dan Penjaga Pintu Air;

Resiko 2 : Pelayanan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada tidak optimal;

- Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Irigasi;

Resiko 3 : GP3A/IP3A tidak aktif;

- Melaksanakan kegiatan Pembinaan GP3A / IP3A;

Resiko 4 : Kegagalan Konstruksi;

- Perencanaan Teknis yang matang dan Pengawasan Pelaksanaan yang ketat;
- Memaksimalkan fungsi uji laboratorium konstruksi;

3. Tujuan 3 : Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman menjangkau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pelosok perdesaan;

Resiko 1 : Banyak Jalan kabupaten Banyumas dalam kondisi rusak

- Melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan;
- Melaksanakan survey kondisi Jalan secara berkala;

Resiko 2 : Banyak jembatan Kabupaten dalam kondisi Rusak

- Melaksanakan kegiatan Peningkatan kondisi Jembatan;
- Melaksanakan survey kondisi Jembatan secara berkala;

Resiko 3 : Rendahnya angka pertambahan jumlah jembatan di Kabupaten Banyumas;

- Melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan
- Menyusun skala prioritas Pembangunan Jembatan

- Resiko 4 : Kegagalan Konstruksi;
- Perencanaan Teknis yang matang dan Pengawasan Pelaksanaan yang ketat;
 - Memaksimalkan fungsi uji laboratorium konstruksi;
- Resiko 5 : Rasio panjang jalan di Kabupaten Banyumas masih rendah
- Melaksanakan kegiatan Pembangunan jalan;
 - Menyusun skala prioritas Pembangunan jalan;
- Resiko 6 : Tidak tersedia Lahan / tanah untuk pembangunan infrastruktur;
- Perencanaan Strategis yang matang dan prioritas penganggaran yang perlu dikawal bersama.
 - Melaksanakan kegiatan pengadaan Lahan / tanah untuk pembangunan infrastruktur;
- Resiko 7 : Akses infrastruktur jalan perdesaan kurang memadai;
- Memfasilitasi kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- Resiko 8 : Akses Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk kurang memadai;
- Melaksanakan pembangunan jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk dengan memasukan jalan poros desa sebagai jalan kabupaten.
- Resiko 9 : Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan;
- Melaksanakan kegiatan pembangunan bangunan pelengkap jalan berupa trotoar dan atau drainase/ saluran pembuangan air;
- 4. Tujuan 4** : Mempertahankan kondisi jalan yang mantap agar bisa berfungsi secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna;
- Resiko 1 : Menurunnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik;
- Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Jalan;
 - Pemeliharaan jalan sesuai skala prioritas;
- Resiko 2 : Menurunnya Jumlah Jembatan dalam kondisi baik;
- Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Jembatan;
 - Pemeliharaan Jembatan sesuai skala prioritas;
- Resiko 3 : Kelompok Masyarakat Peduli Jalan (KMPJ) kurang aktif;
- Melaksanakan kegiatan Pembinaan KMPJ;
- Resiko 4 : Panjang jalan yang ada belum dapat menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman;

- Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan;
- Resiko 5 : Banyak Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar;
- Melaksanakan kegiatan pengamanan aset jalan (Sosialisasi Perda, Penegakan Perda);
- Resiko 6 : Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan;
- Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Drainase jalan;
- Resiko 7 : Infrastruktur Talud / bronjong pengaman jalan dalam kondisi rusak;
- Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Talud / bronjong pengaman jalan;
- Resiko 8 : Kegagalan Konstruksi;
- Perencanaan Teknis yang matang dan Pengawasan Pelaksanaan yang ketat;
 - Memaksimalkan fungsi uji laboratorium konstruksi;
- Resiko 9 : Sistem Informasi / Data base jalan dan jembatan kurang berkualitas;
- Pemanfaatan dan *updating* aplikasi Sistem Informasi/Data base Jalan dan Jembatan.
 - Melaksanakan kegiatan pendataan/survey kerusakan jaringan jalan dan jembatan dengan melibatkan tenaga UPTD yang rutin dan melekat menjadi tupoksinya.
- Resiko 10 : Data Jalan dan jembatan kurang berkualitas;
- Ada personil khusus yang merekap data yang terkumpul dan mengolahnya menjadi data matang;
- 5. Tujuan 5** : Meningkatkan pengelolaan bangunan milik pemerintah dan layanan informasi penataan ruang;
- Resiko 1 : Kegagalan Konstruksi;
- Perencanaan Teknis yang matang dan Pengawasan Pelaksanaan yang ketat;
 - Memaksimalkan fungsi uji laboratorium konstruksi;
- Resiko 2 : Banyak Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Rusak;
- Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan bangunan milik pemerintah;

Resiko 3 : Pengelolaan bangunan milik pemerintah tidak optimal;
- Melaksanakan kegiatan pembangunan bangunan milik pemerintah;

6. Tujuan 6 : Mewujudkan Keterpaduan penanganan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah;

Resiko 1 : Perencanaan Teknis Dinas PU tidak berkualitas;
- Perencanaan yang memperhitungkan seluruh aspek resiko;

Resiko 2 : Rekomendasi Pelayanan Masyarakat kurang memuaskan;
- Melaksanakan kegiatan Sistem pelayanan Rekomendasi Pelayanan Masyarakat yang memadai;

Resiko 3 : Penyedia Jasa Konstruksi di kabupaten Banyumas kurang berkembang;
- Melaksanakan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Melaksanakan Penyusunan database Jasa Konstruksi;

Resiko 4 : Jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik tertunda;
- Sinkronisasi Penganggaran, Perencanaan dan Proses Pengadaan;

Resiko 5 : Gagal Lelang;
- Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi yang perlu terus ditingkatkan;
- Adanya komunikasi / sosialisasi yang baik di dunia Jasa Konstruksi daerah.
- Menyusun Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) secara periodik untuk meminimalkan adanya paket yang kurang diminati karena HPS yang terlalu rendah.

Resiko 6 : Pelaksanaan Pekerjaan Lambat / Terjadi Putus Kontrak;
- Penerapan Manajemen Konstruksi dan proses Pengawasan yang ketat;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan.

7. Tujuan 7 : Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang andal, efektif dan efisien;

Resiko 1 : Kualitas sarana prasarana aparatur rendah;
- Melaksanakan kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana;

- Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Peralatan kantor / kendaraan dinas dan perlengkapan pendukung lainnya;
- Resiko 2 : Pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai prosedur;
- Melaksanakan Peningkatan kapasitas SDM;
 - Melakukan reviu dan evaluasi secara berjenjang terhadap kinerja aparatur di bawahnya;
 - Memberikan penghargaan dan hukuman kepada pegawai sesuai ketentuan;
 - Mengusulkan penambahan jumlah SDM di bidang tehnik ke BKDD.
- 8. Tujuan 8** : Optimalisasi peran kelembagaan dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.;
- Resiko 1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran kurang berkualitas
- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- Resiko 2 : Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai;
- Melaksanakan kegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - Memaksimalkan fungsi laboratorium konstruksi;
- Resiko 3 : Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan buruk;
- Melaksanakan kegiatan peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - Meningkatkan pengetahuan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan pembekalan/bimbingan teknis bendahara.
 - Melakukan monitor dan evaluasi secara rutin atas tugas masing-masing bendahara berkaitan dengan penyerapan anggaran per bulan.

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan prosedur operasi standar yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Sosialisasi tatap muka tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur dan Peraturan kepegawaian yang ada pada seluruh pegawai.
- Pembuatan surat edaran/pengumuman tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja, dan penempatan SDM.
- Sosialisasi SOP yang ada
- Penayangan Program / Kegiatan melalui Sistem Informasi Rencana Unit Pengadaan (SIRUP).
- Surat edaran, tatap muka dengan penyedia jasa (pihak ke-3)
- Informasi perkembangan dan kendala kegiatan yang ada melalui rapat koordinasi secara rutin satu bulan sekali dan rapat insidentil pada kegiatan yang mendesak.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi resiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

A. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan adalah aktivitas monitoring kinerja pengendalian intern dilaksanakan secara menyatu dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang/Unit Kerja, baik dalam tahap input (perencanaan kegiatan), tahap proses pelaksanaan kegiatan, tahap output (hasil kegiatan) maupun tahap outcome (berfungsinya hasil kegiatan). Kriteria yang digunakan dalam proses pemantauan antara lain berupa kebijakan, pedoman, prosedur, Juklak/Juknis, RKA dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

Penyelenggaraan pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas pelaksanaan pengendalian intern didukung oleh berbagai instrument pengendalian yaitu :

1. Sistem pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, pelaporan realisasi penyerapan anggaran.
2. Sistem pelaporan penyelenggaraan SPIP.
3. Proses pemantauan langsung dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan unsur-unsur pelaksana kegiatan terkait.

B. Evaluasi Terpisah.

Inspektorat Kabupaten Banyumas melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Evaluasi mencakup penilaian secara khusus terhadap efektifitas setiap komponen pengendalian intern. Hasil pelaksanaan evaluasi terpisah dituangkan dalam simpulan mengenai pelaksanaan pengendalian intern dan saran aktivitas yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengendalian intern.

Berdasarkan saran perbaikan system pengendalian intern tersebut, Kepala Dinas melaksanakan tindak lanjut yang relevan yang diyakini dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan di masa datang.

C. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang dilaksanakn oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas terhadap temuan dan rekomendasi hasil audit atau reviu lainnya adalah :

- a. Melaksanakan tindak lanjut yang layak sesuai dengan materi temuan dan rekomendasi.
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut dan status penyelesaian rekomendasi kepada auditor secara berkala.
- c. Menganalisa perkembangan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi guna meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan.

D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas memberikan laporan atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Banyumas.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini menjadi *instrument* untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Purwokerto, Januari 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas

Dr. Ir. IRAWADI, CES.
NIP. 19640418 199103 1 007

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Hampir Tidak Pernah Terjadi	Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa	1
2	Jarang Terjadi	Peristiwa diharapkan tidak terjadi	2
3	Mungkin Terjadi	Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi	3
4	Sering Terjadi	Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi	4
5	Hampir Pasti Terjadi	Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Berarti	Agak mengganggu pelayanan Tidak menimbulkan kerusakan Kerugian kurang dari Rp.50.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000,- Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum Tidak berdampak pada pencemaran / reputasi Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan	1
2	Kecil	Cukup mengganggu jalannya pelayanan Menimbulkan kerusakan kecil Kerugian yang terjadi diatas Rp.50.000,- sampai Rp.1.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000,- Mengganggu pencapaian tujuan instansi meskipun tidak signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal) Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	2
3	Sedang	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000,- sampai Rp.10.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan instansi secara signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	3
4	Besar	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama Kerugian yang terjadi diatas Rp.10.000.000,- sampai Rp.50.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.5.000.000,- Sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan	4
5	Luar Biasa / Bencana	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu Kerusakan Fatal Kerugian yang terjadi diatas Rp.50.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun lebih dari Rp.5.000.000,- Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak Terjadinya KKN dan diproses secara hukum	5

Formulir Skala Kemungkinan

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Skala Kemungkinan Menurut Peserta (1 - 5)
1	2	3	4
1	Meningkatkan pengelolaan SDA melalui konservasi SDA, penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan terpadu;	<p>Embung-embung tidak dimanfaatkan sebagai sumber air baku</p> <p>Sebagian besar mata air dalam kondisi rusak</p> <p>KMPS tidak dapat aktif dalam membantu kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai</p> <p>Panjang sungai yang mengalami pengurangan kapasitas (pendangkalan) semakin bertambah</p> <p>Banyak bangunan liar dan penggunaan lain di Sempadan sungai</p> <p>Banyak Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai yang rawan longsor</p> <p>Panjang talud/bronjong dalam kondisi rusak semakin meningkat</p> <p>Banyak Daerah kritis di bantaran sungai dan badan jalan</p> <p>Sistem Informasi/Data base SDA kurang berkualitas</p> <p>Data Sumber Daya Air kurang berkualitas</p>	
2	Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi untuk memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien;	<p>Kondisi Irigasi kabupaten dalam kondisi rusak jumlahnya semakin besar</p> <p>Pelayanan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada tidak optimal</p> <p>GP3A/IP3A tidak aktif</p> <p>Kegagalan Konstruksi</p>	
3	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman menjangkau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pelosok perdesaan;	<p>Banyak Jalan kabupaten Banyumas dalam kondisi rusak</p> <p>Banyak jembatan Kabupaten dalam kondisi Rusak</p> <p>Rendahnya angka pertambahan jumlah jembatan di Kabupaten Banyumas</p> <p>Kegagalan Konstruksi</p> <p>Rasio panjang jalan di Kabupaten Banyumas masih rendah</p> <p>Tidak tersedia Lahan / tanah untuk pembangunan infrastruktur</p> <p>Akses infrastruktur jalan perdesaan kurang memadai</p> <p>Akses Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk kurang memadai</p> <p>Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan</p>	
4	Mempertahankan kondisi jalan yang mantap agar bisa berfungsi secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna;	<p>Menurunnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik</p> <p>Menurunnya Jumlah Jembatan dalam kondisi baik</p> <p>Kelompok Masyarakat Peduli Jalan (KMPJ) kurang aktif</p> <p>Panjang jalan yang ada belum dapat menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman</p> <p>Banyak Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar</p> <p>Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan</p> <p>Infrastruktur Talud / bronjong pengaman jalan dalam kondisi rusak</p> <p>Kegagalan Konstruksi</p> <p>Sistem Informasi / Data base jalan dan jembatan kurang berkualitas</p> <p>Data Jalan dan jembatan kurang berkualitas</p>	
5	Meningkatkan pengelolaan bangunan milik pemerintah dan layanan informasi penataan ruang;	<p>Kegagalan Konstruksi</p> <p>Banyak Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Rusak</p> <p>Pengelolaan bangunan milik pemerintah tidak optimal</p>	
6	Mewujudkan Keterpaduan penangan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah	<p>Perencanaan Teknis Dinas PU tidak berkualitas</p> <p>Rekomendasi Pelayanan Masyarakat kurang memuaskan</p> <p>Penyedia Jasa Konstruksi di kabupaten Banyumas kurang berkembang</p> <p>Jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik tertunda</p> <p>Gagal Lelang</p> <p>Pelaksanaan Pekerjaan Lambat / Terjadi Putus Kontrak</p>	
7	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang andal, efektif dan efisien;	<p>Kualitas sarana prasarana aparatur rendah</p> <p>Pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai prosedur</p>	
8	Optimalisasi peran kelembagaan dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.	<p>Pelayanan Administrasi Perkantoran kurang berkualitas</p> <p>Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinaamargaan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai</p> <p>Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan buruk</p>	

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas

Tujuan :

1. Meningkatkan pengelolaan SDA melalui konservasi SDA, penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan terpadu
2. Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi untuk memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien
3. Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman menjangkau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pelosok perdesaan
4. Mempertahankan kondisi jalan yang mantap agar bisa berfungsi secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna
5. Meningkatkan pengelolaan bangunan milik pemerintah dan layanan informasi penataan ruang
6. Mewujudkan Keterpaduan penanganan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah
7. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang andal, efektif dan efisien

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Skala Kemungkinan Menurut Peserta													Skor Skala Rata-rata	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4													5	
1	Meningkatkan pengelolaan SDA melalui konservasi SDA, penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan terpadu;	Embung-embung tidak dimanfaatkan sebagai sumber air baku	2	3	3	2	4	2	2	3	2	3	2	2	2		2,46
		Sebagian besar mata air dalam kondisi rusak	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	1	2	1		2,08
		KMPS tidak dapat aktif dalam membantu kegiatan-kegiatan pengelolaan	2	4	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2		2,46
		Panjang sungai yang mengalami pengurangan kapasitas (pendangkalan)	3	4	4	3	5	4	3	3	3	4	3	3	3		3,46
		Banyak bangunan liar dan penggunaan lain di Sempadan sungai	2	3	3	2	4	3	2	3	3	3	2	3	2		2,69
		Banyak Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai yang rawan longsor	2	3	3	2	4	2	2	3	3	3	2	2	2		2,54
		Panjang talud/bronjong dalam kondisi rusak semakin meningkat	2	3	3	2	5	3	2	4	2	3	2	3	3		2,85
		Banyak Daerah kritis di bantaran sungai dan badan jalan	2	3	3	2	5	3	2	4	2	3	2	3	2		2,77
		Sistem Informasi/Data base SDA kurang berkualitas	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4		3,31
	Data Sumber Daya Air kurang berkualitas	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4		3,31	
2	Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi untuk memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien;	Kondisi Irigasi kabupaten dalam kondisi rusak jumlahnya semakin besar	4	3	3	4	5	3	3	3	3	4	4	3	4		3,54
		Pelayanan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	4	3	2	2	5	2	2	3	2	4	4	4	3		3,08
		GP3A/IP3A tidak aktif	4	2	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	4		3,23
		Kegagalan Konstruksi	2	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2		2,46
3	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman menjangkau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pelosok perdesaan;	Banyak Jalan kabupaten Banyumas dalam kondisi rusak	4	4	5	5	4	3	4	4	3	5	5	5	5		4,31
		Banyak jembatan Kabupaten dalam kondisi Rusak	4	4	5	5	3	4	4	3	4	5	5	5	4		4,23
		Rendahnya angka pertambahan jumlah jembatan di Kabupaten	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2		2,46
		Kegagalan Konstruksi	2	3	4	4	3	2	3	2	3	3	2	3	3		2,85
		Rasio panjang jalan di Kabupaten Banyumas masih rendah	2	3	3	4	3	2	3	2	3	3	2	3	2		2,69
		Tidak tersedia Lahan / tanah untuk pembangunan infrastruktur	2	3	4	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2		2,46
		Akses infrastruktur jalan perdesaan kurang memadai	2	3	4	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3		2,62
		Akses Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3		2,62
	Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan	3	3	4	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2		2,54	

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Skala Kemungkinan Menurut Peserta													Skor Skala Rata-rata
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4													5
4	Mempertahankan kondisi jalan yang mantap agar bisa berfungsi secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna;	Menurunnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	4	4	5	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3,85
		Menurunnya Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	4	4	4	5	3	3	3	4	4	5	3	4	4	3,85
		Kelompok Masyarakat Peduli Jalan (KMPJ) kurang aktif	2	3	3	4	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2,54
		Panjang jalan yang ada belum dapat menjamin kendaraan dapat berjalan	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3,31
		Banyak Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan	3	3	5	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3,38
		Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan	3	3	5	5	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3,46
		Infrastruktur Talud / bronjong pengaman jalan dalam kondisi rusak	3	3	5	5	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3,46
		Kegagalan Konstruksi	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3,23
		Sistem Informasi / Data base jalan dan jembatan kurang berkualitas	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3,08
		Data Jalan dan jembatan kurang berkualitas	3	2	3	3	3	3	2	3	2	4	3	2	3	2,77
5	Meningkatkan pengelolaan bangunan milik pemerintah dan layanan informasi penataan ruang;	Kegagalan Konstruksi	2	3	3	2	2	4	2	3	2	4	3	3	4	2,85
		Banyak Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Rusak	2	3	3	3	2	4	2	3	2	4	2	3	2	2,69
		Pengelolaan bangunan milik pemerintah tidak optimal	2	3	2	2	2	4	3	3	2	4	2	3	4	2,77
6	Mewujudkan Keterpaduan penangan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah	Perencanaan Teknis Dinas PU tidak berkualitas	2	3	3	2	2	4	2	3	2	4	3	3	4	2,85
		Rekomendasi Pelayanan Masyarakat kurang memuaskan	2	3	3	3	2	4	2	3	2	4	2	3	2	2,69
		Penyedia Jasa Konstruksi di kabupaten Banyumas kurang berkembang	2	3	2	2	2	4	3	3	2	4	2	3	4	2,77
		Jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik tertunda	2	2	3	2	2	3	2	3	2	4	2	3	4	2,62
		Gagal Lelang	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2,38
		Pelaksanaan Pekerjaan Lambat / Terjadi Putus Kontrak	2	3	3	2	2	4	2	3	2	4	2	3	4	2,77
7	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang andal, efektif dan efisien;	Kualitas sarana prasarana aparatur rendah	3	3	4	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3,15
		Pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai prosedur	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2,62
8	Optimalisasi peran kelembagaan dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan	Pelayanan Administrasi Perkantoran kurang berkualitas	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2,46
		Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam pelaksanaan	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2,62
		Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan buruk	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	4	2,62

Disusun oleh :
Direview oleh :

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Dampak

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas

Tujuan :

1. Meningkatkan pengelolaan SDA melalui konservasi SDA, penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan terpadu
2. Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi untuk memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien
3. Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman menjangkau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pelosok perdesaan
4. Mempertahankan kondisi jalan yang mantap agar bisa berfungsi secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna
5. Meningkatkan pengelolaan bangunan milik pemerintah dan layanan informasi penataan ruang
6. Mewujudkan Keterpaduan penanganan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah
7. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang andal, efektif dan efisien

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Skala Dampak Menurut Peserta													Skor Skala Rata-rata	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4													5	
1	Meningkatkan pengelolaan SDA melalui konservasi SDA, penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan terpadu;	Embung-embung tidak dimanfaatkan sebagai sumber air baku	2	3	3	2	4	2	2	3	2	3	2	2	2		2,46
		Sebagian besar mata air dalam kondisi rusak	2	3	2	2	4	2	2	3	2	2	1	1	1		2,08
		KMPS tidak dapat aktif dalam membantu kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai	2	4	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	1		2,38
		Panjang sungai yang mengalami pengurangan kapasitas (pendangkalan) semakin bertambah	3	4	4	3	5	4	3	3	3	4	3	3	3		3,46
		Banyak bangunan liar dan penggunaan lain di Sempadan sungai	2	3	3	2	4	3	2	3	3	3	2	3	2		2,69
		Banyak Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai yang rawan longsor	3	4	4	3	5	3	3	4	4	4	3	3	3		3,54
		Panjang talud/bronjong dalam kondisi rusak semakin meningkat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5,00
		Banyak Daerah kritis di bantaran sungai dan badan jalan	2	3	3	2	5	3	2	4	2	3	2	3	2		2,77
		Sistem Informasi/Data base SDA kurang berkualitas	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3		3,23
		Data Sumber Daya Air kurang berkualitas	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3		3,23
2	Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi untuk memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien;	Kondisi Irigasi kabupaten dalam kondisi rusak jumlahnya semakin besar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5,00	
		Pelayanan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada tidak optimal	4	3	2	2	4	2	2	3	2	4	4	4	3		3,00
		GP3A/IP3A tidak aktif	4	2	3	3	5	3	3	2	3	4	4	3	4		3,31
		Kegagalan Konstruksi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5,00
3	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman menjangkau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pelosok perdesaan;	Banyak Jalan kabupaten Banyumas dalam kondisi rusak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3,00	
		Banyak jembatan Kabupaten dalam kondisi Rusak	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3,08	
		Rendahnya angka pertambahan jumlah jembatan di Kabupaten Banyumas	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2		2,46
		Kegagalan Konstruksi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5,00
		Rasio panjang jalan di Kabupaten Banyumas masih rendah	2	3	3	4	3	2	3	2	3	3	2	3	2		2,69
		Tidak tersedia Lahan / tanah untuk pembangunan infrastruktur	2	3	4	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2		2,46
		Akses infrastruktur jalan perdesaan kurang memadai	2	3	4	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3		2,62
		Akses Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk kurang memadai	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2		2,54
		Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan	3	3	4	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2		2,54

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Skala Dampak Menurut Peserta													Skor Skala Rata-rata	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4													5	
4	Mempertahankan kondisi jalan yang mantap agar bisa berfungsi secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna;	Menurunnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3,62
		Menurunnya Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3,46
		Kelompok Masyarakat Peduli Jalan (KMPJ) kurang aktif	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2,38
		Panjang jalan yang ada belum dapat menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2,69
		Banyak Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3,23
		Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3,31
		Infrastruktur Talud / bronjong pengaman jalan dalam kondisi rusak	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
		Kegagalan Konstruksi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
		Sistem Informasi / Data base jalan dan jembatan kurang berkualitas	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,77
Data Jalan dan jembatan kurang berkualitas	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	3	2,62		
5	Meningkatkan pengelolaan bangunan milik pemerintah dan layanan informasi penataan ruang;	Kegagalan Konstruksi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	
		Banyak Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Rusak	4	3	3	3	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3,15	
		Pengelolaan bangunan milik pemerintah tidak optimal	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2,62	
6	Mewujudkan Keterpaduan penangan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah	Perencanaan Teknis Dinas PU tidak berkualitas	2	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	2,62	
		Rekomendasi Pelayanan Masyarakat kurang memuaskan	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2,54	
		Penyedia Jasa Konstruksi di kabupaten Banyumas kurang berkembang	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2,46	
		Jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik tertunda	5	5	3	5	5	3	5	3	5	4	5	3	4	4,23	
		Gagal Lelang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	
		Pelaksanaan Pekerjaan Lambat / Terjadi Putus Kontrak	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4,77	
7	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang andal, efektif dan efisien;	Kualitas sarana prasarana aparatur rendah	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2,85	
		Pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai prosedur	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2,62	
8	Optimalisasi peran kelembagaan dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.	Pelayanan Administrasi Perkantoran kurang berkualitas	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2,46	
		Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinaamargaan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2,62	
		Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan buruk	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2,54	

Disusun oleh :
Direview oleh :

Formulir Analisis Risiko

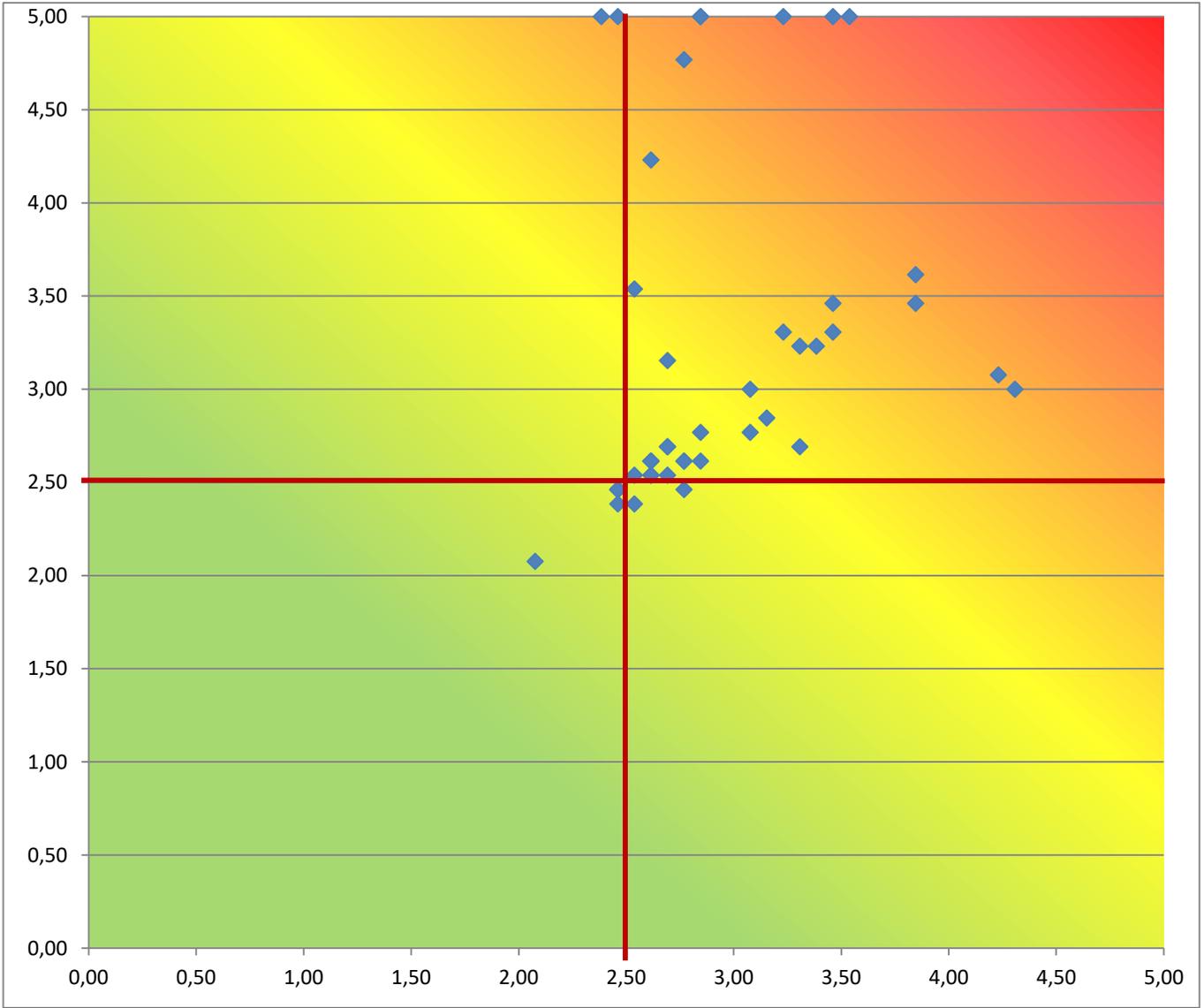
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas

Tujuan :

1. Meningkatkan pengelolaan SDA melalui konservasi SDA, penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan terpadu
2. Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi untuk memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien
3. Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman menjangkau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pelosok perdesaan
4. Mempertahankan kondisi jalan yang mantap agar bisa berfungsi secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna
5. Meningkatkan pengelolaan bangunan milik pemerintah dan layanan informasi penataan ruang
6. Mewujudkan Keterpaduan penanganan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah
7. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang andal, efektif dan efisien

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pengelolaan SDA melalui konservasi SDA, penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan terpadu;	Embung-embung tidak dimanfaatkan sebagai sumber air baku	2,46	2,46	6,06
		Sebagian besar mata air dalam kondisi rusak	2,08	2,08	4,31
		KMPS tidak dapat aktif dalam membantu kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai	2,46	2,38	5,87
		Panjang sungai yang mengalami pengurangan kapasitas (pendangkalan) semakin bertambah	3,46	3,46	11,98
		Banyak bangunan liar dan penggunaan lain di Sempadan sungai	2,69	2,69	7,25
		Banyak Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai yang rawan longsor	2,54	3,54	8,98
		Banyak Daerah kritis di bantaran sungai dan badan jalan	2,85	2,77	7,88
		Data Sumber Daya Air kurang berkualitas	3,31	3,23	10,69
2	Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi untuk memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien;	Kondisi Irigasi kabupaten dalam kondisi rusak jumlahnya semakin besar	3,54	5,00	17,69
		Pelayanan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada tidak optimal	3,08	3,00	9,23
		GP3A/IP3A tidak aktif	3,23	3,31	10,69
		Kegagalan Konstruksi	2,46	5,00	12,31
3	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman menjangkau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pelosok perdesaan;	Banyak Jalan kabupaten Banyumas dalam kondisi rusak	4,31	3,00	12,92
		Banyak jembatan Kabupaten dalam kondisi Rusak	4,23	3,08	13,02
		Rendahnya angka pertambahan jumlah jembatan di Kabupaten Banyumas	2,46	2,46	6,06
		Kegagalan Konstruksi	2,85	5,00	14,23
		Rasio panjang jalan di Kabupaten Banyumas masih rendah	2,69	2,69	7,25
		Tidak tersedia Lahan / tanah untuk pembangunan infrastruktur	2,46	2,46	6,06
		Akses infrastruktur jalan perdesaan kurang memadai	2,62	2,62	6,84
		Akses Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk kurang memadai	2,62	2,54	6,64
		Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan	2,54	2,54	6,44

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5	6
4	Mempertahankan kondisi jalan yang mantap agar bisa berfungsi secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna;	Menurunnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	3,85	3,62	13,91
		Menurunnya Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	3,85	3,46	13,31
		Kelompok Masyarakat Peduli Jalan (KMPJ) kurang aktif	2,54	2,38	6,05
		Panjang jalan yang ada belum dapat menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	3,31	2,69	8,91
		Banyak Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	3,38	3,23	10,93
		Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan	3,46	3,31	11,45
		Infrastruktur Talud / bronjong pengaman jalan dalam kondisi rusak	3,46	5,00	17,31
		Kegagalan Konstruksi	3,23	5,00	16,15
		Sistem Informasi / Data base jalan dan jembatan kurang berkualitas	3,08	2,77	8,52
		Data Jalan dan jembatan kurang berkualitas	2,77	2,62	7,24
5	Meningkatkan pengelolaan bangunan milik pemerintah dan layanan informasi penataan ruang;	Kegagalan Konstruksi	2,85	5,00	14,23
		Banyak Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Rusak	2,69	3,15	8,49
		Pengelolaan bangunan milik pemerintah tidak optimal	2,77	2,62	7,24
6	Mewujudkan Keterpaduan penanganan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah	Perencanaan Teknis Dinas PU tidak berkualitas	2,85	2,62	7,44
		Rekomendasi Pelayanan Masyarakat kurang memuaskan	2,69	2,54	6,83
		Penyedia Jasa Konstruksi di kabupaten Banyumas kurang berkembang	2,77	2,46	6,82
		Jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik tertunda	2,62	4,23	11,07
		Gagal Lelang	2,38	5,00	11,92
		Pelaksanaan Pekerjaan Lambat / Terjadi Putus Kontrak	2,77	4,77	13,21
7	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang andal, efektif dan efisien;	Kualitas sarana prasarana aparatur rendah	3,15	2,85	8,98
		Pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai prosedur	2,62	2,62	6,84
8	Optimalisasi peran kelembagaan dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.	Pelayanan Administrasi Perkantoran kurang berkualitas	2,46	2,46	6,06
		Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai	2,62	2,62	6,84
		Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan buruk	2,62	2,54	6,64



ALAT BANTU PEMBUATAN BAGAN PETA RISIKO

1	Bagan peta risiko disajikan dalam matriks untuk memudahkan penentuan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam Kegiatan Pengendalian
2	Pada saat menyusun bagan ini, perlu dijaga konsistensi penggunaan skala-skala dampak dan kemungkinan terjadinya, sebagaimana telah dilakukan pada tahapan sebelumnya.
3	Selain dapat dibuat menjadi satu bagan besar dalam institusi, pembuatan bagan peta risiko dapat dilakukan terpisah bagi masing-masing penanggung jawab risiko. Contohnya, bagan risiko tingkat institusi, dapat dibuat terpisah dengan bagan risiko tingkat operasional. Bagan risiko di tingkat operasional dapat dibuat terpisah per bidang.
4	Pembuatan bagan peta risiko dapat memanfaatkan program spreadsheet yang ada : a Buatlah kolom-kolom yang sesuai untuk menyajikan skor risiko. Skor risiko tersebut merupakan kombinasi antara skor dampak dan skor kemungkinan. Pembuatan kolom perlu mempertimbangkan kemudahan trasir-ulang risiko kepada proses bisnis dan tujuan yang akan terpengaruh oleh risiko tersebut. b Atas skor risiko yang dihasilkan, buatlah bagan peta risikonya. Jika menggunakan Microsoft Excel, dapat menggunakan X Y (scatter) diagram. c Pastikan bahwa bagan peta risiko menampilkan risiko dengan skor tinggi di sisi kwadran kanan-atas untuk memudahkan pembaca bagan peta risiko di kemudian hari.
5	Setelah bagan peta risiko dibuat, perlu dilakukan validasi oleh pimpinan unit/institusi. Validasi ini untuk memastikan bahwa pimpinan instansi sepakat dengan hasil penilaian risiko seperti tertuang dalam peta risiko dan akan digunakan dalam merumuskan kebijakan mitigasi risiko lebih lanjut.
6	Selanjutnya, mintakan pimpinan instansi menentukan besarnya toleransi mereka terhadap risiko, baik terhadap besarnya kemungkinan maupun dampak. Gambarkan toleransi tersebut dalam bentuk garis toleransi terhadap kemungkinan (garis vertikal) maupun terhadap dampak (garis horizontal)

No	Program / Kegiatan	Tujuan	Nomor Resiko	Pernyataan Risiko	Pemilik Resiko	Penyebab			Dampak	
						Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Uraian
1				3	4	6	7	5	9	8
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi untuk memberikan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien	11	Kondisi Irigasi kabupaten dalam kondisi rusak jumlahnya semakin besar	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Alam	UC	Tingginya Luas Irigasi kabupaten dalam kondisi rusak	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Menurunnya kualitas pemenuhan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada
	Operasi Pemeliharaan Irigasi		12	Pelayanan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada tidak optimal	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Alam	C/UC	Tingginya Tingkat Kerusakan infrastruktur Irigasi kabupaten	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Menurunnya kualitas pemenuhan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada
	Penanganan Infrastruktur Irigasi (DAK)		13	GP3A/IP3A tidak aktif	OPD / Bidang Pelaksana	Masyarakat	C/UC	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan GP3A/IP3A	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Menurunnya peran GP3A / IP3A / masyarakat dalam pengelolaan Sungai
	Pelaksanaan IPDMIP		14	Kegagalan Konstruksi	OPD / Bidang Pelaksana	SDM dan Sarana Prasarana pendukung perencanaan Kurang memadai	UC	Perencanaan pekerjaan buruk	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Konstruksi / Bangunan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
	Pembinaan IP3/GP3A									
	Perencanaan Teknis SDA dan Irigasi									
3	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah Ajibarang	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman menjangkau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pelosok perdesaan;	15	Banyak Jalan kabupaten Banyumas dalam kondisi rusak	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Alam	C/UC	Tingginya Tingkat Kerusakan infrastruktur Jalan kabupaten	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur jalan terhambat
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah Banyumas									
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah Jatilawang									
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah Purwokerto									
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah Sokaraja									
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah Sumpiuh									
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah Cilongok									
	Bantuan Keuangan Penanganan Infrastruktur Jalan/Jembatan (Bantuan Gubernur)									
	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan / Jembatan									
	Pembangunan / Penggantian Jembatan Kabupaten		16	Banyak jembatan Kabupaten dalam kondisi Rusak	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Alam	C/UC	Tingginya Tingkat Kerusakan infrastruktur Jembatan kabupaten	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur jembatan terhambat
		17	Rendahnya angka pertambahan jumlah jembatan di Kabupaten Banyumas	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Masyarakat	C/UC	Pertumbuhan kawasan yang sangat cepat belum didukung pertumbuhan akses jalan	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur jembatan terhambat	
	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	18	Kegagalan Konstruksi	OPD / Bidang Pelaksana	SDM dan Sarana Prasarana pendukung perencanaan Kurang memadai	UC	Perencanaan pekerjaan buruk	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Konstruksi / Bangunan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten	19	Rasio panjang jalan di Kabupaten Banyumas masih rendah	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Masyarakat	C/UC	Pertumbuhan kawasan yang sangat cepat belum didukung pertumbuhan akses jalan	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur jalan terhambat	

No	Program / Kegiatan	Tujuan	Nomor Resiko	Pernyataan Risiko	Pemilik Resiko	Penyebab			Dampak	
						Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Uraian
1				3	4	6	7	5	9	8
1	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan		20	Tidak tersedia Lahan / tanah untuk pembangunan infrastruktur	OPD / Bidang Pelaksana	OPD / Bidang Pelaksana / Satgas Pengadaan Tanah / BPN / Pemilik Tanah	C/UC	Pelaksanaan kegiatan pengadaan Lahan / tanah untuk pembangunan infrastruktur tidak sesuai jadwal	Pemkab Banyumas / OPD / Masyarakat	Tehambatnya pelaksanaan kegiatan Fisik Infrastruktur
			21	Akses infrastruktur jalan perdesaan kurang memadai	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Tumbuhnya kawasan pemukiman baru	C/UC	Karena kebutuhan pemukiman baru yang paling gampang dan murah adalah membuka wilayah pinggiran.	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur jalan terhambat
			22	Akses Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk kurang memadai	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Penurunan kondisi jalan penghubung	C/UC	Rendahnya rasio Panjang Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur jalan terhambat
	Pembangunan / Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Perkuatan Tebing Jalan		23	Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	OPD / Bidang Pelaksana	C/UC	Jalan yang memiliki trotoar dan atau drainase/ saluran pembuangan air jumlahnya sedikit	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur jalan terhambat
4	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan / Jembatan Pemeliharaan Ringan Jalan Wilayah Ajibarang Pemeliharaan Ringan Jalan Wilayah Banyumas Pemeliharaan Ringan Jalan Wilayah Cilogok Pemeliharaan Ringan Jalan Wilayah Jatilawang Pemeliharaan Ringan Jalan Wilayah Purwokerto Pemeliharaan Ringan Jalan Wilayah Sokaraja Pemeliharaan Ringan Jalan Wilayah Sumpiuh Rehabilitasi Jembatan Kabupaten Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Pengadaan Bahan Konstruksi Jembatan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan dan Jembatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Peduli Jalan Pemeliharaan Drainase / Gorong-Gorong	Mempertahankan kondisi jalan yang mantap agar bisa berfungsi secara maksimal, berdaya guna dan berhasil guna;	24	Menurunnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Alam	C/UC	Tingginya Tingkat Kerusakkan infrastruktur Jalan kabupaten	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur jalan terhambat
			25	Menurunnya Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Alam	C/UC	Tingginya Tingkat Kerusakkan Infrastruktur Jembatan	Pemkab Banyumas / OPD / Masyarakat	Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur jembatan terhambat
			26	Kelompok Masyarakat Peduli Jalan (KMPJ) kurang aktif	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	OPD / Bidang Pelaksana	C	Kurangnya kegiatan pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Jalan (KMPJ)	Pemkab Banyumas / OPD / Masyarakat	Kerusakan Jalan meningkat. Kebutuhan anggaran pengelolaan Jalan meningkat.
			27	Panjang jalan yang ada belum dapat menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Alam	C/UC	Tingginya Tingkat Kerusakkan infrastruktur Jalan kabupaten	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur jalan terhambat

No	Program / Kegiatan	Tujuan	Nomor Resiko	Pernyataan Risiko	Pemilik Resiko	Penyebab			Dampak	
						Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Uraian
1				3	4	6	7	5	9	8
			28	Banyak Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	OPD / Bidang Pelaksana	C	Kurangnya kegiatan pengamanan aset jalan (Sosialisasi Perda, Penegakan Perda)	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Pemanfaatan aset Pemda secara ilegal. Hilangnya aset pemda.
			29	Resiko kerusakan jalan dan gangguan kenyamanan pengguna jalan	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Alam	C/UC	Tingginya Tingkat Kerusakan Infrastruktur Drainase jalan	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur jalan terhambat
			30	Infrastruktur Talud / bronjong pengaman jalan dalam kondisi rusak	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	Alam	C/UC	Tingginya Tingkat Kerusakan Infrastruktur Talud / bronjong pengaman jalan	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Keselamatan masyarakat bisa terancam
	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		31	Kegagalan Konstruksi	OPD / Bidang Pelaksana	SDM dan Sarana Prasarana pendukung perencanaan Kurang memadai	UC	Perencanaan pekerjaan buruk	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Konstruksi / Bangunan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
	Penyusunan Data Base Jalan		32	Sistem Informasi / Data base jalan dan jembatan kurang berkualitas	OPD / Bidang Pelaksana	OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana / ASN	C	Kualitas SDM dan sarana prasarana kurang memadai	Pemkab Banyumas / OPD / Masyarakat	Kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
			33	Data Jalan dan jembatan kurang berkualitas	OPD / Bidang Pelaksana	OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana / ASN	C	Kualitas SDM dan sarana prasarana kurang memadai	Pemkab Banyumas / OPD / Masyarakat	Kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
5	Perencanaan Teknis Bidang Tata Bangunan	Meningkatkan pengelolaan bangunan milik pemerintah dan layanan informasi penataan ruang;	34	Kegagalan Konstruksi	OPD / Bidang Pelaksana	SDM dan Sarana Prasarana pendukung perencanaan Kurang memadai	UC	Perencanaan pekerjaan buruk	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Konstruksi / Bangunan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
	Pelayanan Operasional Rekomendasi Teknis Bangunan		35	Banyak Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Rusak	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana	C	Pengelolaan bangunan milik pemerintah tidak optimal	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana / OPD pengguna Aset / Masyarakat	Bisa mengganggu tingkat pelayanan perangkat kepada masyarakat.
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Milik Pemerintah									
	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor Kecamatan dan UPK di Kabupaten Banyumas		36	Pengelolaan bangunan milik pemerintah tidak optimal	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana	C	Pengelolaan bangunan milik pemerintah tidak optimal	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana / OPD pengguna Aset / Masyarakat	Perawatan cenderung tidak optimal sehingga mudah rusak juga
6	Perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum	Mewujudkan Keterpaduan penanganan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan didukung Jasa konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah	37	Perencanaan Teknis Dinas PU tidak berkualitas	OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana	OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana	C	Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Teknis kurang optimal	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana / Masyarakat	Infrastruktur Daerah yang berkualitas rendah
	Pembinaan Jasa Konstruksi dan Masyarakat		38	Rekomendasi Pelayanan Masyarakat kurang memuaskan	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana	C	Sistem pelayanan Rekomendasi Pelayanan Masyarakat kurang memadai	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana / Masyarakat	Pelayanan masyarakat terhambat

No	Program / Kegiatan	Tujuan	Nomor Resiko	Pernyataan Risiko	Pemilik Resiko	Penyebab			Dampak	
						Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Uraian
1			3		4	6	7	5	9	8
			39	Penyedia Jasa Konstruksi di kabupaten Banyumas kurang berkembang	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana	OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana / Penyedia Jasa Konstruksi	C	Kurangnya Pembinaan Jasa Konstruksi	Pemkab Banyumas / OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana / Penyedia Jasa Konstruksi / Masyarakat	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak optimal
			40	Jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik tertunda	OPD / Bidang Perencana	SDM dan Sarana Prasarana pendukung perencanaan Kurang memadai	C	Proses perencanaan lambat	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Layanan / pemanfaatan hasil Konstruksi / Bangunan tertunda
			41	Gagal Lelang	OPD	OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana / SDM Perencana Teknis	C/UC	Tidak ditemukan pemenang, karena Paket pekerjaan kurang diminati (HPS terlalu rendah)	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Tehambatnya pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur
			42	Pelaksanaan Pekerjaan Lambat / Terjadi Putus Kontrak	Pemkab Banyumas / Rekanan	Rekanan Penyedia Jasa / OPD / SDM Pengawas	C/UC	Manajemen Proyek buruk	Pemkab Banyumas / Masyarakat	Tehambatnya pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang andal, efektif dan efisien;	43	Kualitas sarana prasarana aparatur rendah	OPD / Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Pegawai YBS	OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana	C	Kualitas sarana prasarana aparatur kurang memadai	Pemkab Banyumas / OPD / Sekretariat / Subbag Pelaksana / Pegawai	Tehambatnya pelaksanaan seluruh kegiatan
			44	Pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai prosedur	OPD / Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Pegawai YBS	Kurangnya peningkatan kapasitas SDM melalui diklat dll. Kurangnya sarana dan prasarana Dinas	C/UC C/UC	Kurangnya kapasitas SDM dalam melaksanakan Tugas Kurangnya dukungan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Tugas	Pemkab Banyumas / OPD / Pegawai / Masyarakat Pemkab Banyumas / OPD / Pegawai / Masyarakat	Terhambatnya pelayanan Dinas Terhambatnya pelayanan Dinas
8	Operasional UPTD DPU Wilayah Ajibarang Operasional UPTD DPU Wilayah Banyumas Operasional UPTD DPU Wilayah Jatilawang Operasional UPTD DPU Wilayah Purwokerto	Optimalisasi peran kelembagaan dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.	45	Pelayanan Administrasi Perkantoran kurang berkualitas	OPD / Bidang Pelaksana	OPD / Bidang Pelaksana / Seksi Pelaksana / ASN	C	Tata kelola Administrasi Perkantoran kurang baik	Pemkab Banyumas / OPD / Masyarakat	Kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

